****

**GUBERNUR PAPUA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

* 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
	2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
	dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
	3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang ......../2

- 2 -

* 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
	3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
	5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
	Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
	8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan ........./3

- 3 -

* 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

24. Peraturan ........./4

- 4 -

* 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
	6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
	Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
	7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
	8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
	9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017;
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

35. Peraturan ........../5

- 5 -

* 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
	2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
	tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
	4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7686
	Tahun 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp13.968.876.703.796,00 bertambah sejumlah Rp147.945.806.637,00 sehingga menjadi Rp14.116.822.510.433,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pendapatan Daerah |  |
|  a. Semula | Rp13.968.876.703.796,00 |
|  b. Bertambah | Rp 147.945. 806.637,00 |
|  Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp14.116.822.510.433,00 |
| 2. Belanja Daerah |  |
|  a. Semula | Rp15.083.876.703.796,00 |
|  b. Bertambah | Rp 570.787.042.637,00 |
|  Jumlah belanja setelah perubahan | Rp15.654.663.746.433,00 |
|  Defisit setelah Perubahan | Rp (1.537.841.236.000,00) |
|  |  |
|  | 3. Pembiayaan ......../2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| - 6 - |
|  |  |
| 3. Pembiayaan Daerah |   |
|  a. Penerimaan |  |
|  1) Semula | Rp1.190.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 422.841.236.000,00 |
|  Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp1.612.841.236.000,00 |
|  b. Pengeluaran |  |
|  1) Semula | Rp75.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 0,00 |
|  Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp 75.000.000.000,00 |
|  |  |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp1.537.841.236.000,00 |
|  |  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp 0,00 |

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Pendapatan Asli Daerah  |  |
|  1) Semula | Rp1.308.280.585.796,00 |
|  2) Bertambah | Rp 58.880.000.000,00 |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp1.367.160.585.796,00 |
| b. Dana Perimbangan  |  |
| 1) Semula | Rp4.419.279.187.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp 124.555.330.637,00 |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp4.543.834.517.637,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |  |
| 1) Semula | Rp8.241.316.931.000,00  |
| 2) Berkurang | Rp (35.489.524.000,00) |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp8.205.827.407.000,00 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Pajak daerah |  |
|  1) Semula | Rp1.030.423.565.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 15.055.000.000,00 |
|  Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp1.045.478.565.000,00 |
| b. Retribusi daerah |  |
|  1) Semula | Rp 82.930.263.480,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp82.930.263.480,00 |
|  |  |
| c. hasil ......../7 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| - 7 - |
|  |  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan |  |
|  1) Semula | Rp 52.810.182.602,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp52.810.182.602,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |  |
|  1) Semula | Rp 142.116.574.714,00 |
|  2) Bertambah | Rp 43.825.000.000,00 |
|  Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp185.941.574.714,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Dana bagi hasil  |  |
|  1) Semula | Rp 606.163.244.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp 606.163.244.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum |  |
|  1) Semula | Rp2.570.118.273.000,00 |
|  2) Bertambah/(Berkurang) | Rp 0,00 |
|  Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp2.570.118.273.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus |  |
|  1) Semula | Rp1.242.997.670.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 124.555.330.637,00 |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp1.367.553.000.637,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

|  |
| --- |
| a. Pendapatan hibah |
|  1) Semula | Rp500.000.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp175.000.000,00 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp675.000.000,00 |
| b. Dana otonomi khusus |
|  1) Semula | Rp5.615.816.931.000,00  |
|  2) Berkurang | Rp (35.664.524.000,00) |
|  Jumlah Dana otonomi khusus setelah perubahan | Rp5.580.152.407.000,00 |
| c. Dana tambahan infrastruktur  |
|  1) Semula | Rp2.625.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah dana tambahan infrastruktur  setelah perubahan | Rp2.625.000.000.000,00 |

Pasal ........./8

- 8 -

**Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Belanja tidak langsung  |  |
|  1) Semula | Rp8.072.068.175.855,00 |
|  2) Bertambah | Rp 31.742.287.641,00 |
|  Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp8.103.810.463.496,00 |
| b. Belanja langsung |  |
|  1) Semula | Rp7.011.808.527.941,00 |
|  2) Bertambah | Rp 539.044.754.996,00 |
|  Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp7.550.853.282.937,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Belanja pegawai  |  |
|  1) Semula | Rp1.358.388.729.440,00 |
|  2) Berkurang | Rp (37.541.183.231,34) |
|  Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp1.320.847.546.208,66 |
| b. Belanja subsidi |  |
|  1) Semula | Rp 40.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp 40.000.000.000,00 |
| c. Belanja hibah |  |
|  1) Semula | Rp1.089.144.837.924,00 |
|  2) Berkurang | Rp (50.759.417.995,00) |
|  Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp1.038.385.419.929,00 |
| d. Belanja bantuan sosial |  |
|  1) Semula | Rp 91.509.700.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 9.518.031.371,34 |
|  Jumlah belanja batuan sosial setelah perubahan | Rp 101.027.731.371,34 |
| e. Belanja bagi hasil |  |
|  1) Semula | Rp 383.667.481.485,00 |
|  2) Bertambah | Rp 6.497.305.000,00 |
|  Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 390.164.786.485,00 |
| f. Belanja bantuan keuangan |  |
|  1) Semula | Rp5.094.357.427.006,00 |
|  2) Bertambah | Rp 109.027.552.496,00 |
|  Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp5.203.384.979.502,00 |
| g. Belanja tidak terduga |  |
|  1) Semula | Rp15.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp (5.000.000.000,00) |
|  Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp10.000.000.000,00 |

- 9 -

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

 a. Belanja pegawai

|  |  |
| --- | --- |
|  1) Semula | Rp278.960.841.876,00 |
|  2) Berkurang | Rp (4.895.790.109,00) |
|  Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp274.065.051.767,00 |

b. Belanja barang dan jasa

|  |  |
| --- | --- |
|  1) Semula | Rp3.202.630.586.130,00 |
|  2) Bertambah | Rp 618.308.592.233,92 |
|  Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp3.820.939.178.363,92 |

c. Belanja modal

|  |  |
| --- | --- |
|  1) Semula | Rp3.530.217.099.935,00 |
|  2) Berkurang | Rp (74.368.047.128,92) |
|  Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp3.455.849.052.806,08 |

**Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

|  |
| --- |
| a. Penerimaan  |
|  1) Semula | Rp1.190.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp 422.841.236.000,00 |
|  Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp1.612.841.236.000,00 |
| b. Pengeluaran  |
|  1) Semula | Rp 75.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp 75.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

|  |
| --- |
| * 1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 |
|  1) Semula | Rp650.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah | Rp422.841.236.000,00 |
|  Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp1.072.841.236.000,00 |
| * 1. Pencairan Dana Cadangan
 |  |
|  1) Semula | Rp540.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp 540.000.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

|  |
| --- |
| a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua |
|  1) Semula | Rp75.000.000.000,00 |
|  2) Bertambah/Berkurang | Rp 0,00 |
|  Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp75.000.000.000,00 |

Pasal ......../10

- 10 -

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| c. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;  |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;  |
| g. | Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;  |
| i. | Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

**Pasal 6**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 20 September 2017

**GUBERNUR PAPUA,**

**CAP/TTD**

**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 22 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Papua

 CAP/TTD

 T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR 6/217 TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**

**NIP. 19661202 198603 1 002**